

**PERSEPSI MAHASISWA FISIP UIN AR-RANIRY TERHADAP
DEMOKRATISASI DI INDONESIA
ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

HAYATUN NISA

NIM. 180801007



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H/ 2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hayatun Nisa
NIM : 180801007
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl T Umar Gang Seulanga No 14 Seutui

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 April 2025

Yang menyatakan



Hayatun Nisa

Hayatun nisa

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSEPSI MAHASISWA FISIP UIN AR-RANIRY TERHADAP DEMOKRATISASI DI INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

Hayatun Nisa

NIM: 180801007

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

NIP: 197810162008011011

**PERSEPSI MAHASISWA FISIP UIN AR-RANIRY TERHADAP
DEMOKRATISASI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Hayatun Nisa
NIM.180801007

Pada Hari/Tanggal, 21 April 2025
22 syawal 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., Ed.
NIP. 197810162008011011

Sekretaris,


Shafiyur Rahman S.A.P
NIP. -

Penguji I,


Mumtazinur, S.IP., M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,


Danil Akbar Taqwadin B.IAM., M.Sc.
NIP. 198904082023211022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-
Raniry Darussalam-Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry terhadap dinamika demokratisasi di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah menganut sistem demokrasi pasca-reformasi, dinamika politik yang terjadi selama dua periode pemerintahan Jokowi memunculkan berbagai respon dan interpretasi, khususnya di kalangan generasi muda yang kini semakin aktif dalam ranah sosial dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa-sebagai bagian dari agen perubahan sosial-menilai jalannya demokrasi dan kualitas kebijakan pemerintah dalam menjamin prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, partisipasi, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 80 mahasiswa FISIP yang dipilih secara acak. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26, dan seluruh item dinyatakan valid serta reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap proses demokratisasi di era Jokowi. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat persetujuan terhadap indikator-indikator seperti representasi politik, efektivitas pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi politik generasi muda, serta dampak perubahan sosial yang terjadi. Namun, terdapat pula sebagian responden yang menunjukkan sikap netral atau kritis, khususnya dalam menanggapi isu pembatasan kebebasan berpendapat dan meningkatnya dominasi elit politik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi dinilai berjalan cukup baik, mahasiswa tetap memandang perlunya perbaikan dalam aspek transparansi dan inklusivitas. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana generasi muda menilai praktik demokrasi kontemporer dan memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi publik.

Kata Kunci: *Persepsi Mahasiswa, Demokratisasi, Era Joko Widodo, Politik Indonesia, FISIP UIN Ar-Raniry.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry terhadap Demokratisasi di Indonesia Era Presiden Joko Widodo” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
2. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, arahan, serta inspirasi selama masa perkuliahan.
3. Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta semangat dalam menyelesaikan studi ini.
5. Teman-teman seperjuangan di FISIP UIN Ar-Raniry yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami dinamika demokrasi di Indonesia dari perspektif generasi muda.

Banda Aceh, April 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Penelitian Terdahulu	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Demokrasi	12
2.2 Konsep Demokratisasi	25
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Demokratisasi di Indonesia.....	28
2.4 Dampak Demokratisasi di Era Presiden Joko Widodo	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian.....	32
3.2 Populasi dan Sampel	32
3.3 Jenis dan sumber data.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Skala Pengukuran.....	35
3.6 Uji Instrumen Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.2 Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia.....	6
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Responden.....	36
Tabel 3.3 Blue print penelitian.....	36
Tabel 3.4 Uji Validitas Instrumen Penelitian.....	38
Tabel 3.5 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi penelitian.....	61
Lampiran 2 Angket penelitian sebelum validasi.....	62
Lampiran 3 Lampiran penelitian setelah validasi.....	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara Demokrasi terbesar di dunia. Dalam sejarahnya Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Sebagai Negara demokrasi Indonesia mengalami beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Diantaranya: 1) Demokrasi Parlementer (1945-1959) Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. 2) Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. 3) Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998) Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. 4) Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang) Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.¹ Demokratisasi sendiri merupakan suatu proses maupun tahapan menuju demokrasi, yaitu sebuah sistem yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat di dalam pelaksanaan kegiatan ketatanegaraan.

¹ anugrahdwi., *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya*, september 2023. Diakses pada tanggal 24 april 2025 dari situs: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>

Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap Rancangan berbagai Undang-Undang seperti Revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai Demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita seakan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan.²

Beberapa peristiwa politik turut mewarnai pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Kasus tersebut diantaranya skandal hukum yang menjerat ketua KPK di tahun 2015, pengungkapan besar-besaran korupsi E-KTP yang menyandung nama-nama petinggi partai politik di tahun 2017, hingga reshuffle "kabinet kerja" jilid 2 oleh Presiden Jokowi yang melibatkan 14 kementerian dan satu badan negara.³

² Heru Margianto, *Tantangan Demokrasi Indonesia*. FISIP Universitas Pakuan. Diakses pada tanggal 16 July 2020 dari situs <https://fisib.unpak.ac.id/berita/tantangan-demokrasi-di-indonesia>

³ Nur Nazhifah, "Analisis Politik Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *kompasiana*, jumat 18 juni 2021, hlm.1.

Pada Pilpres 2019 lalu terjadinya kontestasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Jika Pilpres 2014 silam, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dengan lawannya Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun, pada Pilpres 2019 lalu, petahana Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. *Rematch* antara Jokowi dengan Prabowo ini yang berbeda adalah kekuatan pendukung dalam koalisi.⁴

Pada Pilpres 2019 sebagai petahana menyebabkan Jokowi memperoleh dukungan besar dari berbagai partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sedangkan Prabowo malah didukung hanya oleh empat partai politik yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.⁵

Berbeda dengan Pilpres 2014 lalu, Jokowi-Jusuf Kalla hanya memperoleh dukungan dari empat partai politik seperti PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura; sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa didukung oleh banyak partai politik seperti Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat.

Jokowi akhirnya memenangkan kembali pertarungan ulang itu. Jokowi adalah Presiden yang terpilih hingga dua kali masa jabatannya, sama seperti Susilo

⁴ Efriza. Analisis Kemunduran Demokrasi Pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)*. Volume 2 Nomor 11 2022. Hlm. 3

⁵ Ibid, Hlm.3.

Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi adalah Presiden Indonesia ke-7, sama seperti SBY, Jokowi juga *a leader by constitution*.⁶

Menurut catatan Tjipta Lesmana bahwa gaya kepemimpinan Jokowi merupakan antitesis dari kepemimpinan penguasa politik Indonesia. Jokowi memang pemimpin yang keluar dari “pakem” penguasa politik di Indonesia. Di awal kepemimpinannya Jokowi dianggap sebagai sosok yang merakyat, senang turun langsung melalui aksi blusukannya ke kampung-kampung kumuh dan senang becek, sederhana penampilannya dalam tutur kata maupun kehidupannya.⁷

Dua puluh satu tahun setelah reformasi, peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, Australia, mengatakan demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya. Salah satu penyebab kemunduran terbesar demokrasi Indonesia adalah kepemimpinan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Jokowi menyatakan komitmennya dalam menjaga demokrasi. Tapi pada kenyataannya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan anti-demokrasi dihasilkan di bawah kepemimpinannya. Diantaranya adalah keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) walau ditentang banyak pihak. Sikap aparat keamanan dalam mengamankan aksi demonstrasi di

⁶Efriza. *Analisis Kemunduran Demokrasi Pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin*. Journal Of Government and Social Issues (JGSI). Volume 2 Nomor 11 2022. Hlm. 3

⁷Tjipta, Lesmana, *Tuna-Empati: Kelemahan Utama Pemimpin Indonesia*, Jurnal Politika, Menimbang Kepemimpinan Politik, Vol. 10, No. 1, Tahun 2014.

berbagai kota yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP juga diwarnai tindakan represif anti-demokrasi.⁸

Beberapa kebijakan Jokowi yang menyumbang pelemahan demokrasi, bisa dilihat sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Peraturan Presiden (perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perppu tentang ormas yang digunakan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, walau benar secara substansi tapi cacat secara prosedur karena mengeliminasi proses peradilan. Selain itu, perpres jabatan TNI juga dianggap berbenturan dengan undang-undang (UU) dan semangat reformasi. Kekhawatiran masyarakat sipil bukan tanpa sebab. Di masa Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadi perangkat otoritarianisme yang memfasilitasi banyak pelanggaran HAM dan melanggengkan kekuasaan.⁹

Pada 2019, ditangkapnya beberapa pendukung Prabowo Subianto lawan politik Jokowi pada masa pemilihan umum advokat Eggi Sudjana dan pensiunan jenderal Kivlan Zen atas tuduhan makar juga menjadi isu anti-demokrasi. Tuduhan makar seperti ini belum pernah dilakukan di masa pemerintahan pasca reformasi, kecuali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

⁸ Juwita Hayyuning Prastiwi. *Kemunduran Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi: Nyalakan Tanda Bahaya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Brawijaya. 2019, hal.1.

⁹ Ibid, hal.1.

yang memenjarakan aktivis Filep Karma karena mendukung kemerdekaan Papua Barat. Pada era Jokowi, banyak tokoh-tokoh aktivis yang dikriminalisasi.¹⁰

Demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018 dalam Indeks demokrasi yang dikeluarkan *The Economist Intelligence Unit*. Dalam indeks tersebut Indonesia termasuk dalam kategori sebagai demokrasi tidak sempurna (*flawed democracy*). Status ini artinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil dan menghormati kebebasan sipil dasar, namun memiliki beberapa persoalan seperti pelanggaran kebebasan media serta persoalan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, Indonesia juga mengalami penurunan pada indeks aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin, dan pada aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017.¹¹

Untuk melihat indeks demokrasi Indonesia dari awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 awal menjabat sampai tahun 2022, *The Economist Intelligence Unit* telah merilis data tersebut sebagai berikut.

Tabel 1.1
Indeks Demokrasi Indonesia

Tahun	Poin
2014	6.95
2015	7.03
2016	6.97
2017	6.39

¹⁰Ibid, hal.1.

¹¹ Ibid, hal.1.

2018	6.39
2019	6.48
2020	6.30
2021	6.71
2022	6.71

Sumber: Economist Intelligence Unit 2023

Berdasarkan data Economist Intelligence Unit kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan pada 2022. Ini terlihat dari skor Indeks Demokrasi Indonesia yang sebesar 6,71 poin pada tahun lalu. Skor tersebut tak berubah dari tahun 2021 yang juga sebesar 6,71 poin. Hanya saja, Indonesia harus turun ke peringkat 54 di dunia. Indonesia pun masuk dalam kategori demokrasi cacat. Adapun, indeks demokrasi ini disusun berdasarkan lima indikator. Indikator yang memiliki skor tertinggi berasal dari proses pemilu dan pluralisme sebesar 7,92 poin. Fungsi pemerintahan Indonesia memiliki skor sebesar 7,86 poin. Lalu, indikator partisipasi politik memiliki skor sebesar 7,22 poin. Kebebasan sipil di Indonesia mencatatkan skor sebesar 6,18 poin. Posisinya diikuti oleh budaya politik yang memiliki skor sebesar 4,38 poin. Sebagai informasi, indeks demokrasi yang dibuat EIU membagi negara-negara dalam empat kategori. Keempatnya adalah demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan beberapa gebrakan kontroversial yang menuai banyak persepsi dari kalangan masyarakat terkhusus mahasiswa. Setelah menjadi Presiden maka akan menghadapi berbagai hal persoalan yang harus diselesaikan, termasuk menaikkan indek demokrasi Indonesia di mata dunia. Persepsi yang muncul beragam baik

dari persepsi yang positif berupa dukungan dan persepsi negatif yang berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo.¹²

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menampilkan pesan.¹³ Persepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Jadi persepsi yang dimaksud oleh penulis adalah pandangan, anggapan dan sebab yang diperoleh melalui pengamatan objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry adalah calon cendekiawan yang memiliki jiwa agamis, pemikiran terbuka dan wawasan luas. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Menurut penulis Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di FISIP UIN Ar-Raniry yang memiliki pemikiran dan wawasan yang luas.¹⁴ Alasan penulis memilih Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry sebagai objek penelitian karena aksesnya mudah dicapai sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. Selain itu, sebelumnya peneliti sudah melakukan pra survey terlebih dahulu dan kemudian penulis mendapatkan bahwa Mahasiswa FISIP UIN Ar-raniry memiliki karakteristik yang layak untuk

¹² Ricky Kurniawan, *Persepsi Mahasiswa Mengenai 4 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Studi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, Lampung, 2020, hlm .6.

¹³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015) h.50

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta, 2001)h. 1023

dilakukan penelitian. Selain itu peneliti juga sudah mendapatkan izin dari lokasi tersebut untuk menganalisis dan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada.

kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini menimbulkan persepsi dikalangan mahasiswa. Sebagian mahasiswa setuju dengan kebijakan yang diterapkan Presiden Joko Widodo karena dianggap mensejahterakan masyarakat Indonesia dan ingin memajukan bangsa, namun di sisi lain justru Presiden Joko Widodo dianggap menekan masyarakat yang kritis terhadap kepemimpinannya dan melakukan pelemahan hukum melalui Perpu yang dikeluarkan. Keadaan ini tentunya tidak lepas dari persepsi dari mahasiswa yang menangkap dan merasakan kebijakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengenai demokrasi. Oleh karena itu permasalahan ini perlu diteliti untuk mendapat jawaban yang jelas dan tepat tentang persepsi mahasiswa Fakultas Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Terhadap Demokratisasi Di Indonesia Selama Era Presiden Joko Widodo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Terhadap Demokratisasi Di Indonesia Selama Era Presiden Joko Widodo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Terhadap Demokratisasi Di Indonesia Selama Era Presiden Joko Widodo.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber literatur lampau yang menjadi referensi dasar dalam meneliti agar adanya perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang demokratisasi selama era presiden Joko Widodo dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Muhammad Sarifin (2022)	Demokratisasi dan Populisme Studi Atas Populisme di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono	Berdasarkan hasil penelitian kehidupan berdemokrasi di Indonesia semakin matang. Terbukti dengan berbagai gebrakan populis yang diluncurkan pemerintahan SBY, cukup jadi solusi akan kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bahkan, beberapa kembali diadaptasi oleh pemerintahan Joko Widodo dengan nama dan modifikasi yang sedikit berbeda saja. Program populis yang dianggap masih layak diteruskan justru menjadi strategi bagi lawan politiknya.

	Zahra Mufidah, Hambali, Jumili Arianto (2024)	Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada Persepsi Universitas Riau Mahasiswa Terhadap Kepemimpinan Presiden Joko Widodo berada pada kategori “Baik”. Hal ini dapat diketahui dari hasil rata-rata nilai persentase 62, 2% dimana rentang ini berada pada interval 50,01%-75,00%, sehingga termasuk pada kategori “Baik” .
3	Azka Akmalul Birri, Yusnita Dwi Ferawati. Ahmad Rifa'i	Sistem pemerintahan demokrasi dan demokratisasi dalam masyarakat Indonesia	Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat sering dihadapkan pada tantangan dan hambatan dalam menghadirkan demokrasi yang sejati. Beberapa faktor seperti ketimpangan kekuasaan, ketidakstabilan politik, konflik sosial, dan intervensi eksternal dapat mempengaruhi kemajuan demokratisasi. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Dari penelitian terdahulu di atas, penelitian yang saya miliki memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian, jumlah populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian serta metode yang digunakan